

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah Andi, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Albi Anggito, Dan Johan Setia. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Abidin Slamet Dan H.Amirudin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung:Pustaka Setia,no 1 1996).
- Romli, Atmasasmita. *Teori Dan Kapita Selekt Krimonologi*. Bandung: Eresco, 1992.
- Aminah, Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press, 1998..
- Nasir, Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nursariani, Faisal. *Simatupang. Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv. Pustaka Prima, 2018
- Ali, Ghufuran. *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui* Jakarta: Amzah, 2007.
- Arif, Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Jhon, Gray. *Children Are From Heaven*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2011.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesi.*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rasyad, Hasan. dan Khalil. *Tarikh Tasyyi*“. Jakarta: Amzah, 2015.

B. Artikel Jurnal

- Laila Trisna Yunita. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.” *Journal of Law Society*, 17: 2 (2018):196.
- Ramdani, M. “Tinjauan Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak.” *jurnal of law Society, and Islamic studies* 1:1 (2018):40.
- Yulianis Safrinadiya Rahman. ”Kejahatan Kekerasan Dan Brutalisme Massa (Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Hukum: Al Adl Banjarmasin* 14: 2 (13 Juli 2022): 271.

- Laurensius Arliman S. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Respublica* 17: 2 (2018): 196.
- Darmawan, Widya, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso T Raharjo. "Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka." *Universitas Padjajaran* 6: 1 (2019): 105.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal Of Islamic Studies* 1:1 (Januari 2018): 40.
- Darmini. "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak." *qowwam* 13:1 (Juni 2019): 48.
- Mas udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali Kemaslahatan Sebagai Acuan Syari'ah." *Jurnal Ilmu dan Ulumul Qur'an* VI: 3 (1995): 97.
- Puji Lestari dan Dwi Lestari Puji "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak". Martabat: *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2,(2018).

C. Skripsi

- Zahra, Silvana. "Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Usia Dini" Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia. 12 no. 6 (2023).
- Permata Alam Fitriani. "Peran KPAID dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Terlantar Usia 6 Tahun di Daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya" Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 10 no. 2 (2023).
- Ade Putri Norvita Sari. "Pelaksanaan Peranan KPAID Palembang dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 23/2002" Skripsi, Universitas Sriwijaya, 5 no. 6 (2014).
- Hardiyanti Kartika "Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying (Studi di KPAID Jatim)" Skripsi, UPN "Veteran" Jawa Timur, 10 no.4 (2023).
- Mubarok M.A. "Peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam Mewujudkan Perlindungan Anak" (S1, Institut Syekh Nurjati Cirebon) 4 no. (2018).
- Ali, Haidir. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar". Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

Laila Yunita, Trisna. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Ramdani, M. “Tinjauan Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 tahun 2003 Yang Mengatur Perusakan Fasilitas Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan IPTU Budi Rahmanto, S.H., selaku Kanit PPA Polresta Cirebon, diwawancarai oleh Taufik Hidayat, Cirebon, 18 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibunda Hj. Fifi Sofiyah selaku Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Cirebon, 18 Februari 2026.

F. INTERNET

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *KPAI: Pemantauan SPPA di Mahkamah Agung dan Bareskrim Polri*. Diakses dari:

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pemantauan-sppa-di-mahkamah-agung-dan-bareskrim-polri>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Menteri PPPA Soroti Pentingnya Perlindungan Maksimal Anak dalam Kasus Kekerasan di Medan. Diakses dari:

<https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-soroti-pentingnya-perlindungan-maksimal-anak-dalam-kasus-kekerasan-di-medan>

ANTARA News (melalui merdeka.com). *KemenPPPA: Januari – Agustus 2023 Ada 1.352 Anak Diputus Pidana Pokok*. Diakses dari:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-januari-agustus-2023-ada-1352-anak-diputus-pidana-pokok-199997-mvk.html>

Jurnal Intervensi Sosial – Talenta USU. Peran KPAID dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Cirebon. Diakses dari:

<https://talenta.usu.ac.id/is/article/view/18888>

JDIH Sukoharjo – Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia. 5 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Diakses dari:

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>

Kemen PPPA – Menteri PPPA Pastikan Anak Berkonflik dengan Hukum Mendapat Diversi. Artikel ini membahas keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi dan penekanan perlindungan sesuai Pasal 15 UU No. 35/2014.

<https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-pastikan-13-anak-berkonflik-dengan-hukum-di-polresta-cirebon-mendapatkan-diversi>

ANTARA News – KPAI Minta UU 35/2014 Direvisi untuk Memperkuat Kewenangan Lembaga. Berita ini relevan untuk konteks kelembagaan perlindungan anak dan kebutuhan penguatan peraturan.

<https://www.antaranews.com/berita/4859657/kpai-minta-uu-35-2014-direvisi-untuk-memperkuat-kewenangan-lembaga>

The Jakarta Post – Pelanggaran Hak Anak dalam Aksi 212. Memberikan gambaran tentang pandangan KPAI bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik berdasarkan UU Perlindungan Anak.

<https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/03/possible-childrens-rights-violations-at-212-rally-kpai.html>